

MENELUSURI WARISAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA KOLONIAL BELANDA

Irwan¹, Ishomuddin², Faridi³

¹²³Universitas Muhammadiyah Malang - Indonesia

Email: irwanmpdi974@gmail.com, Ishomuddin@umm.ac.id, faridi@umm.ac.id

Submit :	Received :	Review :	Published :
13 Januari 2024	03 November 2024	11 – 20 Desember 2024	27 Desember 2024
DOI	https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.631		

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the existence and policies of Islamic education during the Dutch colonial period. This research is necessary because the existence of Islamic education in Indonesia is inseparable from a historical process that has experienced ups and downs. The history of education in Indonesia has undergone remarkable changes, closely tied to the era of colonialism. A qualitative method with a descriptive approach is employed to analyze the data, which is obtained from literature after a thorough study of relevant sources regarding the policies of Islamic education during the Dutch colonial period. The study finds that the Dutch hegemony in shaping policies for Islamic education in Indonesia, particularly by Islamic educational institutions, is based on political, ideological, and cultural reasoning in the colonial style to enforce its influence over the indigenous people of Indonesia. Consequently, this analysis reveals that the policies issued by the Dutch government during its colonial period in Indonesia often disadvantaged the Muslim community. In conclusion, these findings indicate that Islamic education became less flexible and challenging to develop. Nevertheless, efforts to fight for and sustain Islamic education continue through the establishment of institutions such as pesantren (Islamic boarding schools) and madrasahs, despite facing limitations and challenges.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam selama periode penjajahan Belanda. Pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, menghadapi tantangan besar, karena pemerintah kolonial lebih fokus mengembangkan sekolah-sekolah sekuler berbasis Barat untuk mencetak tenaga kerja yang loyal, sehingga pelajaran agama, terutama Islam, hampir terabaikan dalam sistem pendidikan formal. Penelitian ini dianggap penting karena perkembangan pendidikan Islam di Indonesia terkait erat dengan dinamika sejarah yang mengalami perubahan signifikan, terutama pada masa kolonialisme. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yang diperoleh dari bahan pustaka setelah studi mendalam pada literatur. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka sejumlah dua puluh literatur yang relevan terkait eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Data penelitian yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni pendidikan Belanda dalam merancang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, terutama oleh lembaga pendidikan Islam, didasarkan pada pertimbangan politik, ideologis, dan kultural kolonialis untuk memperkuat dominasi pemerintah terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan kolonial tersebut cenderung merugikan umat Islam. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperjuangkan dan mempertahankan pendidikan Islam tetap dilakukan melalui pendirian lembaga-lembaga seperti pondok pesantren dan madrasah, meski dihadapi dengan keterbatasan dan tantangan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Kolonial Belanda, Pendidikan Islam*

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	DOI	Halaman
15	2	Desember	2085-7365	2722-3027	10.47625	118-134

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, menghadapi tantangan besar, karena pemerintah kolonial lebih fokus mengembangkan sekolah-sekolah sekuler berbasis Barat untuk mencetak tenaga kerja yang loyal, sehingga pelajaran agama, terutama Islam, hampir terabaikan dalam sistem pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan Islam tetap bertahan secara mandiri melalui pesantren, surau, dan madrasah sebagai pusat pembelajaran agama dan pembentukan karakter masyarakat Muslim.¹

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, berperan vital dalam menjaga ajaran agama dan budaya lokal. Meski menghadapi keterbatasan akses dan tekanan dari pemerintah kolonial, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan. Ulama dan santri kerap berkontribusi dalam gerakan perjuangan, baik secara langsung maupun melalui penyebaran semangat kemerdekaan.²

Kebijakan kolonial Belanda, seperti Ordonansi Sekolah Liar (1932), menjadi hambatan besar bagi pendidikan Islam dengan mewajibkan lembaga pendidikan, termasuk madrasah, memiliki izin resmi. Banyak madrasah terpaksa ditutup karena aturan ini, yang bertujuan melemahkan pengaruh Islam di masyarakat.³ Di tengah tekanan tersebut, organisasi seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) muncul sebagai respon. Muhammadiyah mendirikan sekolah modern yang mengintegrasikan agama dan ilmu umum, sementara Nahdlatul Ulama mempertahankan tradisi pesantren dengan pengajaran yang lebih terstruktur.⁴ Meskipun menghadapi berbagai rintangan, pendidikan Islam tetap bertahan sebagai penjaga identitas dan moral masyarakat, sekaligus menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran nasional dan semangat perjuangan. Upaya ini juga meletakkan dasar bagi perkembangan pendidikan Islam modern pasca-kemerdekaan.

Pendidikan adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memfasilitasi perkembangan dan kedewasaan siswa. Upaya ini melibatkan berbagai jalur pembelajaran, baik yang terstruktur secara formal di lembaga pendidikan, maupun melalui pengalaman informal dan kegiatan nonformal. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, pendidikan bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, kemampuan, dan keterampilan yang mendukung perkembangan holistik individu.⁵

Pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi antara ketiga entitas tersebut menjadi kunci utama dalam membentuk lingkungan pendidikan yang seimbang dan berkelanjutan. Sekolah

¹ H Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2018).

² Idris Muhammad Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Al Hikmah* 14, no. 1 (2013): 101–119.

³ F Mubin and A Aziz, "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda," ... *Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* (2020).

⁴ Abdul Mu'thi et al., "KH Ahmad Dahlan (1868-1923)" (Museum Kebangkitan Nasional, 2015).

⁵ Yusriadi Yusriadi, Sekolah Tinggi, and Ilmu Administrasi Puangrimaggalung, "The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject At State Senior High School 9 Manado," *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021): 2021; Moh Zaini et al., "Tantangan Pendidikan; Upaya Repurifikasi Pendidikan Akhlaq Abad 21," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2022): 106

memiliki peran dalam menyampaikan materi pendidikan secara formal, sementara keluarga memberikan dukungan dan pengarahan yang lebih personal kepada anak-anak di lingkungan rumah. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, baik melalui sumber daya lokal maupun norma-norma budaya yang diterapkan. Dengan bekerja sama, ketiga pihak dapat menciptakan iklim pendidikan yang optimal, memberikan kesempatan bagi pertumbuhan holistik peserta didik, dan membentuk individu yang siap menghadapi tantangan masa depan.⁶

Tanpa akses ke pendidikan, manusia akan menghadapi kesulitan dalam mencapai perkembangan, terutama dalam hal pengetahuan, sehingga berpotensi tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Serupa dengan itu, kondisi suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan fondasi pendidikan yang kokoh dan berkualitas tinggi. Dengan kata lain, kemajuan dan perkembangan suatu negara sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang diterapkan di dalamnya. Pendidikan menjadi pondasi utama yang membentuk masyarakat yang terdidik, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian dan investasi yang memadai dalam sektor pendidikan guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi individu dan negara secara keseluruhan.⁷

Kemajuan pendidikan dalam suatu negara erat kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan yang berkuasa, baik itu kebijakan politik maupun agama. Kedua aspek ini memiliki pengaruh besar terhadap arah dan kualitas pendidikan suatu bangsa. Kebijakan politik mencakup regulasi dan prioritas yang diberikan terhadap sektor pendidikan, sementara kebijakan agama turut menentukan orientasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diintegrasikan dalam sistem pendidikan.⁸

Pemerintahan yang bijaksana akan merancang kebijakan pendidikan yang mencakup aspek-aspek penting seperti aksesibilitas, kualitas pengajaran, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan politik dapat memainkan peran penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk pendidikan, memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mendukung perkembangan sistem pendidikan. Tak hanya itu, dampak yang dihasilkan oleh kebijakan politik dapat sangat signifikan terhadap sektor pendidikan. Kebijakan politik memiliki kemampuan untuk membentuk arah dan kelangsungan sistem pendidikan suatu negara. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah politik dapat mencakup regulasi-regulasi yang memengaruhi aspek-

⁶ M. Syahrani Jailani, "Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan," *Tarbiyah & Keguruan* (2015): 1–13; D Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, "Implications for Educational Practice of the Science of Learning and Development," *Applied Developmental Science* 24, no. 2 (2020): 97–140.

⁷ Alexander A. Hernandez, "Green IT Adoption Practices in Education Sector: A Developing Country Perspective," *Waste Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (2019): 1379–1395; Anwar, "Investasi Pendidikan (Suatu Fungsi Untuk Pendidikan Yang Bermutu)," *Al-Fikrah : Jurnal Kependidikan Islam* (2013): 1–10.

⁸ Asep imam Munandar, "Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia," *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 21; Ahmad Zain Sarnoto, "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia," *Journal on Education* 01, no. 1 (2012): 30–31.

aspek kunci, seperti pendanaan, kurikulum, dan kebijakan aksesibilitas.⁹

Dengan demikian, memahami hubungan yang kompleks antara kebijakan politik dan pendidikan menjadi suatu keharusan. Pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan pendidikan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan politik yang mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.¹⁰

Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara mencerminkan keterkaitannya dengan masuknya Islam ke dalam wilayah tersebut. Pendidikan Islam di Nusantara telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama dalam hal struktur lembaga pendidikan. Pada awalnya, lembaga pendidikan tersebut sederhana dan mengikuti pola tradisional, namun seiring waktu, mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan yang semi-modern, seperti lembaga pendidikan berbasis madrasah.¹¹

Pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam, telah melalui sejarah yang kompleks dan berliku. Meskipun mengalami kemajuan, perjalanan pendidikan ini dapat dianggap sebagai sebuah proses yang rumit, terutama dalam konteks perkembangan kebijakan pendidikan Islam. Terdapat berbagai usaha dalam melakukan pembaharuan kurikulum dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Langkah ini diambil tidak hanya untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah, tetapi juga untuk kontribusi lebih besar pada pembangunan nasional secara keseluruhan.¹²

Eksistensi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia memberikan dampak signifikan yang mencerminkan sejarahnya yang panjang. Sejalan dengan perubahan zaman, kurikulum pendidikan Islam mengalami evolusi yang terus berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Semakin berpengaruhnya perubahan zaman, lembaga pendidikan Islam semakin diharapkan untuk memainkan peran yang lebih besar. Dari perspektif sejarah, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak Islam pertama kali memasuki negeri ini pada abad ke-12 M. Menurut catatan Azra, modernisasi kurikulum pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar berasal dari inisiatif Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19.¹³

Perubahan kurikulum pendidikan Islam mencerminkan dinamika dalam upaya

⁹ Sarnoto, "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia"; Muhammad Subhan Iswahyudi et al., *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan Di Masa Depan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023); Nur Efendi and Muh Ibnu Sholeh, "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023): 45–67.

¹⁰ Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar," *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–117; Asep Munandar, "Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia," *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (December 31, 2019): 21.

¹¹ Baharudin Baharudin, "Pendidikan Islam Dan Kekuasaan Politik," *Society* 6, no. 1 (2015): 62–78; Abdul Yuyun Yunita Mujib, "Pendidikan Islam Dan Politik," *Ri'ayah* 03 (2018).

¹² Mujib, "Pendidikan Islam Dan Politik"; M.A Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya* (Jakarta: Prenada Media, 2019); Ira Yuniarti, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022): 182–207.

¹³ Yuniarti, Khodijah, and Suryana, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah"; Wahyuddin Noor, "Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 19–28

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inisiatif tersebut mencakup adaptasi terhadap nilai-nilai lokal dan global serta peningkatan kualitas pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap sejarah kurikulum pendidikan Islam di Indonesia menjadi penting untuk memahami konteks dan evolusi sistem pendidikan Islam dalam menyongsong masa depan.¹⁴

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan Belanda, serta dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat memperkuat kedudukan penjajah. Dalam konteks itu, tujuan pendidikan pun diarahkan untuk kepentingan kolonial. Bahkan, isi pendidikan itu pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Demikian pula dengan pendidikan Islam, sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak kolonial Belanda.¹⁵

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari umat Islam, termasuk dalam perjuangan mengusir penjajah. Umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Indonesia tentunya mempunyai tanggungjawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan, para tokoh Islam menetapkan fondasi pendidikan Islam yang di masa kolonial tidak terakomodir oleh pemerintah penjajah. Pendidikan Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran terutama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah penjajah.¹⁶

Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin Islam mendirikan lembaga pendidikan dan menyediakan tempat bagi individu-individu Muslim untuk menerima pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam merupakan upaya dan kegiatan yang dijalankan dengan tujuan menyebarkan ajaran agama melalui dakwah, menyampaikan prinsip-prinsip, memberikan contoh, melatih keterampilan praktis, memberikan motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pembentukan karakter individu Muslim. Hal terpenting dari pendidikan Islam adalah al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Menetapkan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya karena kebenaran dari perspektif keimanan semata, melainkan juga kebenaran keduanya telah dapat dibuktikan oleh akal berdasarkan sejarah dan pengalaman manusia.¹⁷

Pendidikan agama Islam, seperti yang diuraikan oleh Mahmud, merujuk pada proses mengajar, melatih, dan mendorong manusia untuk memegang teguh sistem kehidupan yang berasal dari Allah SWT. Ini dilakukan melalui bahasa para Rasul-Nya, baik yang tercatat

¹⁴ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (LKIS Pelangi Aksara, 2009); Muhammedi Muhammedi, "Perubahan Kurikulum Di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal," *Jurnal Raudhah* 4, no. 1 (2016).

¹⁵ Sabil Mokodenseho, *Sisi Lain Gerakan Sarekat Islam Di Sulawesi Utara Periode 1920-1950* (Jakad Media Publishing, 2020); Hafsa, "Pendidikan Islam Di Indonesia (Studi Pemberdayaan Madrasah)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 29–35.

¹⁶ Muh Amin, "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang," *Jurnal Pilar* 10, no. 2 (2019): 1–11; A Wahid, "Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda," *Jurnal Kewarganegaraan* (researchgate.net, 2022).

¹⁷ J Guhin, "The Boundaries of Pragmatism in Muslim Education: Comparing the Islamic Pedagogies of Sayyid Qutb and Fethullah Gülen," *Comparing the Islamic pedagogies of Sayyid Qutb and Fethullah Gülen. Critical Research on Religion* 8, no. 3 (2020): 257–272.

dalam al-Kitab maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. dari Tuhan tanpa didampingi Al-Qur'an. Di Indonesia, terdapat tiga jenis lembaga pendidikan yang berkembang, yaitu pesantren, sekolah, dan madrasah. Pesantren adalah satu-satunya lembaga yang berakar pada tradisi asli (indigenous) Nusantara. Sementara itu, sekolah dan madrasah muncul belakangan sebagai hasil interaksi dengan pihak luar. Sekolah muncul setelah adanya interaksi bangsa Indonesia dengan penjajah, sementara madrasah lahir sebagai tanggapan umat Islam di Indonesia terhadap gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan sebagai lembaga yang berlawanan dengan lembaga sekolah yang dibentuk oleh penjajah pada masa kolonial Belanda.¹⁸

Dalam kacamata kolonialis Belanda, secara *de facto* lembaga pendidikan Islam menjadi *training center* dan *cultural center* yang lahir dan dilembagakan oleh masyarakat Islam yang konsisten melawan kolonialisme berbasis pendidikan Islam, serta membumikan pendidikan yang berlandaskan adagium memanusiakan manusia. Hal tersebut menurut Ziemek tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan secara masif oleh pesantren yang dimotori oleh para kyai sebagai aktor intelektualnya. Dua cara yang di tempuh pesantren dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pertama, secara tersembunyi, dilakukan dengan cara bersikap konservatif, defensif, dan isolasionisme. Kedua, perlawanan terbuka, dilakukan dengan cara bersikap non-kooperatif dan anti-kolonialisme. Dipahami bahwa perlawanan tersebut adalah "jihad" dalam menjaga identitas religio-kultural bangsa dari dominasi penetrasi sistem pendidikan sekuler dan invasi militer Belanda. Dengan demikian, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses sejarah yang mengalami pasang surut. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa, yang tidak lepas dari era kolonialisme Belanda. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda.¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari suatu peristiwa.²⁰ Data penelitian bersumber dari bahan pustaka sejumlah dua puluh literatur yang relevan terkait eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Data penelitian yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini disusun dengan mengikuti langkah-langkah penelitian Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan, reduksi dan penyajian

¹⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Buku Kompas, 2002); Barus, "Modernisasi Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra"; A Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

¹⁹ Untung S, "Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren," *Forum Tarbiyah* 11, no. 1 (2013): 2–19; Manfred Ziemek, Butche B Soendjojo, and B Siregar, "Pesantren Dalam Perubahan Sosial," (*No Title*) (1986); Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (LKIS Pelangi Aksara, 2008).

²⁰ John W Creswell, "Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran" (2019).

data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.²¹ Untuk menguji keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah. Triangulasi metode melibatkan penggunaan pendekatan analisis berbeda, seperti analisis tematik dan kritis. Selain itu, triangulasi teori diterapkan dengan mengintegrasikan berbagai teori relevan, seperti teori kolonialisme dan pendidikan.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pendidikan Islam Pra dan Pasca Kolonialisme

Sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan telah menjadi prioritas utama bagi masyarakat Muslim. Islamisasi menjadi alasan utama diadopsinya pengajaran Islam, meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana pada awalnya. Kebutuhan umat Muslim terhadap pendidikan mendorong mereka untuk mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia.²³

Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan yang sebelumnya berhubungan dengan agama Hindu-Budha menjadi pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah menjadi ciri khas dan pusat pembelajaran agama di Indonesia. Umat Islam Minangkabau juga mengambil langkah serupa dengan mengambil alih surau, yang sebelumnya merupakan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan dalam tradisi lokal, menjadi lembaga pendidikan Islam.

Sementara itu, di Aceh, meunasah, yang merupakan lembaga keagamaan dalam tradisi Aceh, dialihfungsikan menjadi lembaga pendidikan Islam. Proses ini mencerminkan upaya untuk memadukan nilai-nilai keagamaan dengan lembaga pendidikan, sehingga umat Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selama berabad-abad, proses transformasi ini telah membentuk keragaman lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mencerminkan adaptasi lokal terhadap ajaran Islam. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang melibatkan penerimaan dan penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks budaya dan tradisional di seluruh nusantara.²⁴

Kondisi pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda menunjukkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam terus menerima tekanan dan perlakuan yang

²¹ Peter D Bachiochi and Sara P Weiner, "Qualitative Data Collection and Analysis," *Handbook of research methods in industrial and organizational psychology* (2004): 161–183; Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (sage, 1994).

²² Creswell, *Research Design* Creswell, J. W. (Pustaka Pelaja, 2016).

²³ M. Miftah Alfiani, Samiha Suweleh, and Lilis Kholifatul Janah, "Islamisasi Nusantara Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam," *Fikrotuna; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2019): 1124; Iswati Upaya Islamisasi, "Upaya Islamisasi Ilmu.....," no. 1 (2017): 90–104.

²⁴ Mushlihah, Sari Narulita, and Rihlah Nur Aulia, "Education and New Direction of Islam Nusantara: Towards Humanitarian and Sustainable Development," *HAYULA: Indonesian Journal of Mustidisciplinay Islamic Studies* 5, no. 2 (2021): 261–270; Nurbaiti Nurbaiti, Mundzier Suparta, and Muhammad Azwar, "Islamic Education and Islamization Channels in Malay Peninsula in 7th-8th Centuries AD," *Buletin Al-Turas* 26, no. 2 (2020): 303–316; Alfurqan Alfurqan, "Evolution and Modernization of Islamic Education In Minangkabau," *Afkaruna* 16, no. 1 (2020): 82–99.

tidak menggembirakan. Meskipun demikian, umat Islam tetap bersikeras dan terus berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kemajuan yang signifikan. Penaklukan bangsa Barat terhadap Dunia Timur dimulai melalui jalur perdagangan. Demikian juga, tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, khususnya dalam memperoleh rempah-rempah yang memiliki nilai tinggi di Eropa. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga memiliki niat untuk menyebarkan ajaran agama yang mereka anut.²⁵

Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (w. 1599) dan berhasil mencapai Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan mereka diusir oleh penduduk pesisir Banten karena perilaku kasar dan sikap sombong. Awalnya, kedatangan Belanda ke Indonesia memiliki motif dagang, tetapi seiring berjalannya waktu, motif ini berkembang menjadi misi-misi lain. Setelah berhasil menguasai, kebijakan yang diterapkan oleh Belanda sangat menekan umat Islam, khususnya para ulama dan pesantren yang mereka dirikan. Latar belakang dari tekanan ini. Pertama, ulama dianggap selalu menjadi hambatan bagi kepentingan Belanda, terutama dalam konteks perdagangan. Kedua, adanya ikatan yang kuat antara rakyat dan ulama, karena ulama dianggap sebagai kelompok intelektual Islam, dan pengaruh mereka semakin kuat ketika mereka berhasil membina pesantren. Ketiga, fakta yang diakui oleh mantan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Thomas Stamford Raffles (w. 1826), bahwa ulama-ulama selalu terlibat dalam setiap pemberontakan.²⁶

Di bidang pendidikan, Belanda memperkenalkan sistem dan metode baru, namun hal ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat mendukung kepentingan mereka dengan biaya yang lebih rendah daripada harus membawa tenaga kerja dari Barat. Konsep yang mereka sebut sebagai pembaharuan pendidikan sebenarnya lebih bersifat *Westernisasi* dan *Kristenisasi*, yang mengutamakan kepentingan Barat dan agama Nasrani. Kedua motif ini menjadi ciri khas kebijakan Belanda selama masa penjajahan mereka di Indonesia.²⁷

Dalam konteks politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam pengembangan pendidikan untuk kaum pribumi, terutama setelah diterapkannya kebijakan Politik Etis (*Ethische Politiek*), tidak hanya memecah belah umat Islam tetapi juga mengeliminasi lembaga pendidikan pesantren yang menolak menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman. Akibatnya, pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern.²⁸

Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memiliki dampak signifikan pada

²⁵ Abuuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Prenada Media, 2022); Sabil Mokodenseho and Arif Zamhari, "The Struggle of Islam and Christianity in the Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942)" (2021).

²⁶ Mokodenseho and Zamhari, "The Struggle of Islam and Christianity in the Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942)"; Alfiani, Suweleh, and Janah, "Islamisasi Nusantara Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam."

²⁷ H Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Kencana, 2014)

²⁸ Sukmurdianto Sukmurdianto and Mona Yulia Zulfa, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.," *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020): 143; Zofrano Ibrahimyiah Magribi Sultani and Yasinta Putri Kristanti, "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20," *Jurnal Artefak* 7, no. 2 (2020): 91.

pendidikan Islam di wilayah tersebut. Imperialisasi dan misionarisasi menjadi dua tujuan utama kolonial Belanda selama keberadaannya di Indonesia. Dalam upaya mengembangkan misi misionaris, pihak kolonial Belanda tidak segan untuk menghukum penduduk pribumi yang memperoleh pengetahuan agama, baik melalui lembaga surau maupun pesantren. Bahkan, kolonial Belanda sering kali mengambil tindakan drastis dengan membunuh penduduk pribumi yang sedang belajar agama Islam. Misi besar yang dijalankan oleh kolonial Belanda diterapkan dengan ketat, termasuk dalam mengeluarkan regulasi terkait pembelajaran agama, khususnya pendidikan Islam bagi masyarakat Indonesia.²⁹

Pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (w. 1844) di Batavia antara tahun 1813-1882, misi Kristenisasi dilaksanakan dengan memaksa pendirian dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah di setiap wilayah Keresidenan. Karena pemerintah kolonial semakin khawatir terhadap pendidikan Islam di Indonesia, mereka membentuk lembaga khusus, yakni Priesterraden, yang berfungsi sebagai pemantau pelaksanaan pendidikan Islam dan kehidupan beragama di Indonesia.³⁰ Selama kolonial Belanda, pendidikan Islam diidentifikasi sebagai pendidikan bumiputera, diikuti oleh orang Indonesia asli. Ada dua bentuk utama pendidikan Islam: sistem transisi dari Hindu ke Islam, yang mencampur unsur Hindu dan Islam, dan sistem pertama di mana murid mendatangi guru. Sistem *pertama* terfokus pada anak bangsawan dan Keraton, sedangkan sistem *pertapa* melibatkan rakyat jelata.³¹

Kedua, sistem pendidikan di surau atau langgar tidak mengenal jenjang kelas, melibatkan murid berdasarkan tingkat keilmuan mereka. Proses belajar fleksibel, dengan kebebasan memilih kelompok pembelajaran. Meja dan papan tulis tidak digunakan; kitab kuning menjadi sumber utama. Metode pembelajaran melibatkan ceramah, membaca, dan menghafal. Sheikh menyampaikan materi dengan duduk dalam setengah lingkaran, sementara murid mendengarkan, mencatat di sisi kitab, atau menggunakan buku khusus. Sistem ini dikenal sebagai halaqoh. *Ketiga*, Pendidikan pesantren menggunakan metode sorogan, yaitu layanan individual di mana Kyai berinteraksi dengan seorang atau sekelompok kecil santri pada tingkat dasar. Santri menyerahkan kitab kepada Kyai, Kyai membacakan beberapa bagian, dan santri mengulangi hingga mahir. Santri yang menguasai materi sebelumnya bisa mempelajari materi baru.³²

Keempat, terdapat metode wetonan atau bandongan, yang merupakan layanan kolektif dengan pendekatan ceramah. Dalam metode ini, Kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab. Para santri mendengarkan bacaan Kyai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya.

²⁹ Moch Khafidz Fuad Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 228–242; Sukmurdianto and Zulfa, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia."

³⁰ Ilham Nur Utomo and Sulistya Putri, "Pergerakan PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar Tahun 1932-1933," *Jurnal Patingalloang* 10, no. 1 (2023): 87; Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)."

³¹ Ahmadi Lubis, "Sekolah Islam Terpadu Dalam Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 1077–1095.

³² Aris Aris and Syukron Syukron, "Perbandingan Metode Bandongan Dan Sorogan Dalam Memahami Kitab Safinatunnajah," *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10.

Kelima, ada metode musyawarah, yaitu metode belajar dalam bentuk seminar atau diskusi untuk membahas setiap masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan partisipasi aktif dari pihak santri, yang diharapkan untuk aktif mempelajari dan mengkaji buku yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Kyai memberikan arahan hanya sebatas yang diperlukan.³³

Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

Dikotomis

Dikotomi pendidikan dalam konteks tulisan ini, merujuk pada konflik antara sistem pendidikan Belanda seperti HIS (Hollandsch-Inlandsche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), AMS (Algemene Middelbare School), dan sejenisnya, dengan pendidikan Islam seperti Pesantren, Dayah, Surau, dan sebagainya. Perbedaan tersebut mencakup pengembangan bidang ilmu, dengan sekolah Belanda menekankan ilmu-ilmu umum atau sekuler, dan pemerintah Belanda tidak menyediakan pendidikan agama di sekolah yang mereka kelola.³⁴

Pemerintah Belanda mempertahankan sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum sesuai peraturan resmi. Pengajaran agama hanya diizinkan dilakukan di luar jam sekolah, sementara pendidikan Islam, terutama di pesantren, bersifat keagamaan dan bersumber dari kitab-kitab klasik. Hal ini menyebabkan dikotomi yang jelas dalam pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Baik lembaga pendidikan umum maupun pesantren memiliki filosofi yang berbeda, menciptakan lulusan dengan orientasi yang berbeda pula. Perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum memicu munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada akhir abad ke-19, yang terus berkembang pada abad ke-20.³⁵ Implikasi Politik Etis, pada pandangan sekilas, dapat dianggap sebagai upaya pembaharuan Belanda di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Namun, sebenarnya, pembaharuan pendidikan ini adalah proses Westernisasi dan Kristenisasi yang bertujuan memenuhi kepentingan Barat dan Nasrani. Motif ini menjadi dasar kebijakan penjajah Barat di Indonesia.

Diskriminatif

Kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat pribumi terbilang sangat ekstrem, terutama melalui upaya untuk menyediakan pendidikan rendah yang se-sederhana mungkin bagi anak-anak Indonesia, sementara juga menghambat perkembangan sekolah setara untuk anak-anak Eropa. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan penjajah lain seperti Spanyol, yang telah mendirikan universitas di Filipina pada awal abad ke-16 untuk masyarakat pribumi, begitu juga dengan Inggris yang membuka universitas di India pada abad ke-17. Sementara itu, Belanda baru mendirikan sekolah tinggi pada dekade ke-2 abad ke-20, dan bahkan itu terjadi dalam keadaan darurat yang dipicu oleh Perang Dunia I. Selain itu, Pemerintah Belanda juga memasukkan unsur diskriminatif dalam

³³ Sofa Oktaviani Ahmad Izzan, "Pengaruh Penerapan Metode Sorogan Dan Wetonan Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Santri Di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpawitan," *Jurnal Masagi* 01, no. 01 (2022): 1–11

³⁴ A Wahid, "Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda," *Jurnal Kewarganegaraan* (researchgate.net, 2022)

³⁵ Erjati Abbas, "Pembaharuan Pendidikan Perspektif Ahmad Dahlan," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5, no. 02 (2020): 214–227

sistem pendidikan, memisahkan antara pendidikan untuk anak-anak Belanda dengan pendidikan untuk anak-anak pribumi.³⁶

Pemerintah Belanda menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu bentuk diskriminasi adalah pembentukan badan khusus oleh Pemerintah Belanda untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Terdapat pendekatan dualistik dengan membedakan bahasa pengantar pendidikan antara orang Belanda (berbahasa Belanda) dan orang pribumi (berbahasa Melayu). Selain itu, ada pendekatan sentralistik di mana pendidikan secara keseluruhan diatur dan ditentukan oleh orang Belanda.³⁷

Tujuan pendidikan bagi pribumi pada masa tersebut adalah menciptakan lulusan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua, memenuhi kebutuhan pegawai negeri atau perusahaan swasta Belanda. Pada tahun 1905, diberlakukan Ordonansi Guru yang mewajibkan izin sebelum guru agama Islam dapat melaksanakan tugasnya, terutama memberikan beban berat kepada guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Ordonansi ini, dianggap memberikan dampak negatif karena dapat digunakan untuk menekan Islam dengan dalih stabilitas keamanan. Pada tahun 1905, kebijakan ini dicabut dan digantikan oleh Ordonansi tahun 1925, yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan peraturan baru pada tahun 1925, yang menyatakan bahwa pengajar Islam harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Pada tahun 1932, diterapkan peraturan yang dapat menutup madrasah dan sekolah tanpa izin atau yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh penjajah.³⁸

Pada masa penjajahan Belanda abad ke-20, lembaga pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (a) pesantren, yang mempertahankan tradisi dan budaya pesantren dengan mengajarkan kitab-kitab klasik; (b) sekolah Islam, yang selain mengajarkan ilmu-ilmu umum, juga memberikan pendidikan agama; (c) madrasah, yang mencoba menggabungkan unsur pesantren dan sekolah dalam sistem baru. Keberadaan madrasah dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat Muslim terhadap pendidikan Islam tradisional yang dianggap kurang sistematis dan tidak memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Masyarakat khawatir juga bahwa mengikuti sekolah-sekolah ala Belanda dapat memperluas pengaruh sekularisme. Oleh karena itu, berdirinya lembaga pendidikan Islam merupakan upaya mengantisipasi sekolah-sekolah pemerintah Belanda dan sejalan dengan gerakan politik di Indonesia. Para tokoh pendidikan Islam menyadari pentingnya mendidik generasi muda agar tidak kehilangan pengaruh ulama dan pemikiran Islam akibat sekolah-sekolah kolonial yang bersikap netral terhadap agama.³⁹

³⁶ Ervin Yunus Evendi Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, "Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial," *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 21–30; F Mubin and A Aziz, "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda," ... *Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* (2020).

³⁷ Alhamuddin et al., "Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 28, 2020): 29–56.

³⁸ Akhmad Fajar Ma'rufin, "Kebijakan Ordonansi Guru Dan Pendidikan Islam Di Jawa Timur 1905-1942" (Universitas Negeri Malang, 2011); Farid Setiawan, "Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2014): 47–70.

³⁹ Subandi Subandi, Bahaking Rama, and Andi Achruh, "Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang," *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 193–205

Nasution dalam tulisannya mengaitkan politik kolonial dengan kebijakan yang didominasi oleh golongan berkuasa, tidak bertumpu pada nilai-nilai etis, dan bertujuan membina kematangan politik serta memperkuat kendali atas tanah jajahannya. Dia mencatat beberapa ciri politik dan praktek pendidikan pemerintah kolonial Belanda, termasuk diskriminasi dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, penekanan perbedaan tajam antara pendidikan Belanda dan pribumi, kontrol sosial yang kuat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi dengan fokus pada menghasilkan pegawai, prinsip konkordansi yang membuat sekolah di Indonesia mirip dengan di Negeri Belanda.⁴⁰

Dampak Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

Kebijakan pendidikan Islam di masa penjajahan Belanda berdampak berbeda di berbagai wilayah Nusantara, tergantung pada dinamika sosial budaya masing-masing daerah. Di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kekuasaan kolonial, kebijakan pendidikan Belanda lebih terstruktur dan terkontrol dengan ketat. Pemerintah kolonial lebih memfokuskan pada pendidikan sekuler yang berbasis Barat, dengan tujuan mencetak tenaga kerja yang loyal terhadap kolonialisme. Akibatnya, pendidikan agama Islam hampir terabaikan dalam sistem pendidikan formal.⁴¹ Namun, meskipun ada pembatasan, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tetap berkembang dan menjadi tempat untuk mempertahankan ajaran Islam serta sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonial.⁴²

Di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, pendidikan Islam berkembang melalui sistem surau yang memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda. Surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan agama dan sosial. Walaupun kebijakan kolonial mulai memperkenalkan sekolah-sekolah sekuler, masyarakat Minangkabau yang memiliki budaya matrilineal dan tradisi pendidikan Islam yang kuat, tetap mempertahankan eksistensi surau dan pesantren. Selain itu, pengaruh tokoh-tokoh reformis Islam, seperti Abdul Karim Amrullah, juga turut mendorong perubahan dalam sistem pendidikan Islam di daerah ini.⁴³

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, pendidikan Islam berpusat pada pesantren dan madrasah yang mengajarkan kitab kuning. Masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki tradisi kultural yang kuat, tetap mempertahankan pendidikan Islam meskipun menghadapi kebijakan kolonial yang berusaha memperkenalkan sistem pendidikan Barat. Meskipun begitu, di wilayah ini, pendidikan Islam lebih banyak berfokus pada aspek keagamaan dan tradisi lokal, yang memungkinkan pendidikan Islam bertahan lebih lama.⁴⁴

Di Kalimantan dan Maluku, pengaruh pendidikan Islam lebih terbatas karena interaksi yang lebih kuat dengan misionaris Kristen yang didukung oleh pemerintah kolonial. Di Kalimantan, misalnya, kebijakan kolonial memperkenalkan pendidikan Kristen di sekolah-

⁴⁰ S Nasution, "Sejarah Pendidikan Indonesia, PT. Bumi Aksara" (Jakarta, 2001); Aslan Aslan, "Dinamika Pendidikan Islam Di Zaman Penjajahan Belanda," *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 6, no. 1 (2018).

⁴¹ Amin, "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang."

⁴² Daulay, *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*.

⁴³ Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia Dan Dunia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

⁴⁴ H Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren* (Elex Media Komputindo, 2014).

sekolah, yang menyebabkan pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam berkembang.⁴⁵ Begitu pula di Maluku, meskipun pendidikan Islam tetap ada melalui pesantren dan madrasah, pengaruh misi Kristen cukup besar dalam mempengaruhi pola pendidikan di wilayah ini.⁴⁶

Aceh, sebagai wilayah yang dikenal dengan semangat keislamannya yang tinggi, menunjukkan resistensi kuat terhadap kebijakan pendidikan kolonial. Pendidikan Islam di Aceh berkembang pesat melalui sistem dayah (pesantren khas Aceh), yang menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Masyarakat Aceh mempertahankan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari identitas mereka, bahkan di tengah tekanan kebijakan kolonial yang berusaha membatasi pendidikan agama.⁴⁷

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pendidikan kolonial Belanda berusaha untuk mengontrol dan membatasi pendidikan Islam, setiap wilayah di Nusantara merespons dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial budaya dan tingkat resistensi masyarakat terhadap kolonialisme. Pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan tantangan yang ada, baik melalui pendirian lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, maupun melalui perlawanan kultural yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa penjajahan mengalami tekanan yang signifikan dari pihak penjajah. Namun, dengan semangat patriotisme dan jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh pejuang Islam, mereka mampu melawan penjajah dengan berbagai cara, termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Keteguhan hati yang melekat dalam semangat umat Islam untuk menegakkan kebenaran menjadi faktor pendukung perkembangan pendidikan Islam. Di sisi lain, kebijakan yang diterapkan oleh penjajah menjadi faktor penghambat. Bagi pemerintah Belanda, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis-kultural tetapi juga memiliki dimensi pedagogis-politis. Eksistensi pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda kadang-kadang menghadapi kebijakan khusus yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, yang dimaksudkan sebagai instrumen efektif untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Namun, meskipun kebijakan pada masa itu keras dan diskriminatif, akhirnya menginspirasi tokoh-tokoh Muslim di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam yang lebih modern tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamentalisme pendidikan Islam, diantaranya yaitu menggabungkan kedua sistem pendidikan yang umum dan agama dalam bentuk madrasah.

Selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih aplikatif dapat diarahkan pada pengembangan strategi konkret untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia saat ini dengan mengambil inspirasi dari pengalaman sejarah pada masa kolonial. Salah satu arah penelitian adalah mengevaluasi relevansi kebijakan pendidikan Islam modern dengan nilai-nilai tradisional yang bertahan di masa penjajahan. Penelitian ini dapat menghasilkan

⁴⁵ Yudi Latif, *Pendidikan Yang Berkebudayaan* (Gramedia Pustaka Utama, 2020).

⁴⁶ Solihah Titin Sumanti, "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia" (2021).

⁴⁷ Sumanti, "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia."

panduan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam kurikulum nasional, sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Erjati. "Pembaharuan Pendidikan Perspektif Ahmad Dahlan." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5, no. 02 (2020): 214–227.
- Abuuddin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam*. Prenada Media, 2022.
- Ahmad Izzan, Sofa Oktaviani. "Pengaruh Penerapan Metode Sorogan Dan Wetonan Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Santri Di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpawitan." *Jurnal Masagi* 01, no. 01 (2022): 1–11.
- Alfiani, M. Miftah, Samiha Suweleh, and Lilis Kholifatul Janah. "Islamisasi Nusantara Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam." *Fikrotuna; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2019): 1124.
- Alfurqan, Alfurqan. "Evolution and Modernization of Islamic Education In Minangkabau." *Afkaruna* 16, no. 1 (2020): 82–99.
- Alhamuddin, Ahmad Fanani, Ilyas Yasin, and Andi Murniati. "Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research." *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 28, 2020): 29–56.
- Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, Ervin Yunus Evendi. "Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial." *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 21–30.
- Amin, Muh. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang." *Jurnal Pilar* 10, no. 2 (2019): 1–11.
- Andiyanto, Tri. "Integrasi Pendidikan Dengan Penuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadis Tri Andiyanto Wasis Aminullah Abstrak Pendahuluan Pendidikan Islam Menjadi Bagian Terpenting Dalam Kehidupan Umat Muslim . Hal Ini Sejalan Dengan Wahyu Yang Pertama Kali Di Dapat Mengarahkan" 03 (2019): 90–116.
- Anwar. "Investasi Pendidikan (Suatu Fungsi Untuk Pendidikan Yang Bermutu)." *Al-Fikrah : Jurnal Kependidikan Islam* (2013): 1–10.
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. LKIS Pelangi Aksara, 2008.
- Aris, Aris, and Syukron Syukron. "Perbandingan Metode Bandongan Dan Sorogan Dalam Memahami Kitab Safinatunnajah." *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10.
- Arofah, Siti. "Gagasan Dasar Dan Pemikiran Pendidikan Islam KH Ahmad Dahlan." *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 13, no. 2 (2016): 114–124.
- Aslan, Aslan. "Dinamika Pendidikan Islam Di Zaman Penjajahan Belanda." *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 6, no. 1 (2018).
- Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Bachiochi, Peter D, and Sara P Weiner. "Qualitative Data Collection and Analysis." *Handbook of research methods in industrial and organizational psychology* (2004): 161–183.
- Baharudin, Baharudin. "Pendidikan Islam Dan Kekuasaan Politik." *Society* 6, no. 1 (2015): 62–78.

- Barnas Rasmana, Sumiyatun. *Ordonansi Guru: Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Guru Agama Islam (1905-1942)*. CV. Anugrah Utama Raharja, n.d.
- Barus, Muhammad Irsan. "Modernisasi Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra." *Jurnal Al-Karim STAI-YAPTIP Pasaman Barat* 2, no. 1 (2017): 1.
- Creswell. *Research Design* Creswell, J. W. Pustaka Pelaja, 2016.
- Creswell, John W. "Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran" (2019).
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. "Implications for Educational Practice of the Science of Learning and Development." *Applied Developmental Science* 24, no. 2 (2020): 97–140.
- Daulay, H Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023): 45–67.
- Guhin, J. "The Boundaries of Pragmatism in Muslim Education: Comparing the Islamic Pedagogies of Sayyid Qutb and Fethullah Gülen." *Comparing the Islamic pedagogies of Sayyid Qutb and Fethullah Gülen. Critical Research on Religion* 8, no. 3 (2020): 257–272.
- Hafsah. "Pendidikan Islam Di Indonesia (Studi Pemberdayaan Madrasah)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 29–35.
- Haidar Putra Daulay, M.A. *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hernandez, Alexander A. "Green IT Adoption Practices in Education Sector: A Developing Country Perspective." *Waste Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (2019): 1379–1395.
- Islamisasi, Iswati Upaya. "Upaya Islamisasi Ilmu.....," no. 1 (2017): 90–104.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Irianto Irianto, Amjad Salong, Nurhasanah Nurhasanah, Ferdinand Salomo Leuwol, Muhamad Januaripin, and Edward Harefa. *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan Di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jailani, M. Syahran. "Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan." *Tarbiyah & Keguruan* (2015): 1–13.
- Kurdi, Alhadar. "Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Di Era Penjajahan Belanda Dan Jepang (Studi Komperasi)." Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014.
- Latif, Yudi. *Pendidikan Yang Berkebudayaan*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Lubis, Ahmadi. "Sekolah Islam Terpadu Dalam Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 1077–1095.
- Ma'rufin, Akhmad Fajar. "Kebijakan Ordonansi Guru Dan Pendidikan Islam Di Jawa Timur 1905-1942." Universitas Negeri Malang, 2011.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. sage, 1994.
- Mokodenseho, Sabil. *Sisi Lain Gerakan Sarekat Islam Di Sulawesi Utara Periode 1920-1950*. Jakad Media Publishing, 2020.

- Mokodenseho, Sabil, and Arif Zamhari. "The Struggle of Islam and Christianity in the Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942)" (2021).
- Mubin, F, and A Aziz. "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda." ... *Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* (2020).
- . "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda." ... *Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* (2020).
- Muhammedi, Muhammedi. "Perubahan Kurikulum Di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal." *Jurnal Raudhah* 4, no. 1 (2016).
- Mujib, Abdul Yuyun Yunita. "Pendidikan Islam Dan Politik." *Ri'ayah* 03 (2018).
- Munandar, Asep. "Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (December 31, 2019): 21.
- Munandar, Asep imam. "Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 21.
- Mushlihin, Sari Narulita, and Rihlah Nur Aulia. "Education and New Direction of Islam Nusantara: Towards Humanitarian and Sustainable Development." *HAYULA: Indonesian Journal of Mustidisciplinay Islamic Studies* 5, no. 2 (2021): 261–270.
- Mu'thi, Abdul, Abdul Munir Mul Khan, Djoko Marihandono, and R Tjahjopurnomo. "KH Ahmad Dahlan (1868-1923)." Museum Kebangkitan Nasional, 2015.
- Nasution, S. "Sejarah Pendidikan Indonesia, PT. Bumi Aksara." Jakarta, 2001.
- Nata, H Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana, 2014.
- Noor, Wahyuddin. "Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 19–28.
- Nurbaiti, Nurbaiti, Mundzier Suparta, and Muhammad Azwar. "Islamic Education and Islamization Channels in Malay Peninsula in 7th-8th Centuries AD." *Buletin Al-Turas* 26, no. 2 (2020): 303–316.
- Nurkholis. "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto" 1, no. 1 (2013): 24–44.
- Rahman, Kholilur. "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.
- Ramayulis, Haji. *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat, Dan Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*. Kalam Mulia, 2011.
- Raya, Moch Khafidz Fuad. "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 228–242.
- Reid, Anthony. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia Dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Ritonga, Asnil Aidah. "Pertumbuhan Dan Perkembangan Institusi Pendidikan Awal Di Indonesia: Pesantren, Surau Dan Dayah." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat*. LKIS Pelangi Aksara, 2009.

- S, Untung. “Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren.” *Forum Tarbiyah* 11, no. 1 (2013): 2–19.
- Sabarudin, Muhammad. “Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan.” *Jurnal Tarbiya UIN SGD* 1 Nomor 1 (2015): 139–174.
- Sarnoto, Ahmad Zain. “Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia.” *Journal on Education* 01, no. 1 (2012): 30–31.
- Setiawan, Farid. “Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2014): 47–70.
- Subandi, Subandi, Bahaking Rama, and Andi Achruh. “Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang.” *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 193–205.
- Sukmurdianto, Sukmurdianto, and Mona Yulia Zulfa. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Mau’izhah* 10, no. 2 (2020): 143.
- Sultani, Zofrano Ibrahimsyah Magribi, and Yasinta Putri Kristanti. “Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20.” *Jurnal Artefak* 7, no. 2 (2020): 91.
- Sumanti, Solihah Titin. “Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia” (2021).
- Tawa, Angelika Bule. “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar.” *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–117.
- Umar, H Nasaruddin. *Rethinking Pesantren*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Usman, Idris Muhammad. “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam.” *Jurnal Al Hikmah* 14, no. 1 (2013): 101–119.
- Utomo, Ilham Nur, and Sulistya Putri. “Pergerakan PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar Tahun 1932-1933.” *Jurnal Patingalloang* 10, no. 1 (2023): 87.
- Wahid, A. “Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda.” *Jurnal Kewarganegaraan*. researchgate.net, 2022.
- . “Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda.” *Jurnal Kewarganegaraan*. researchgate.net, 2022.
- Yasin. “Teori Kebenaran Dalam (Hukum) Islam” (n.d.).
- Yuniarti, Ira, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022): 182–207.
- Yusriadi, Yusriadi, Sekolah Tinggi, and Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung. “The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject At State Senior High School 9 Manado.” *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021): 2021.
- Zaini, Moh, Ahmad Barizi, Triyo Supriyatno, and Marsuki Gani. “Tantangan Pendidikan; Upaya Repurifikasi Pendidikan Akhlaq Abad 21.” *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2022): 106.
- Ziemek, Manfred, Butche B Soendjojo, and B Siregar. “Pesantren Dalam Perubahan Sosial.” (*No Title*) (1986).